

# LAPORAN TAHUNAN KONFLIK SUMBER DAYA ALAM TAHUN 2012 PROPINSI RIAU

## 1. Pendahuluan

Sumberdaya alam sangat penting dan berarti bagi kehidupan banyak orang khususnya mereka yang tinggal di daerah dekat dengan kawasan yang memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi seperti hutan, pantai, pegunungan, dan lain sebagainya. Akses kepada sumber daya alam adalah aset kunci bagi mereka yang menggantungkan kehidupannya pada pola ekonomi berbasis sumber daya alam karena hal tersebut berpengaruh pada subsistensi dan ketersediaan kebutuhan ekonomi mereka.

Konflik sumber daya alam akan menjadi penyebab keterpurukan ekonomi masyarakat sekitar. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kebijakan-kebijakan dalam pengaturan atas akses sumber daya alam yang timpang. Konflik sumber daya alam berbasis masyarakat dapat terjadi pada tingkat lokal, namun tidak jarang melibatkan pelaku-pelaku regional, nasional, atau bahkan global. Konflik tersebut terjadi berkisar konflik atas penggunaan lahan antar masyarakat sampai dengan konflik antara kelompok-kelompok masyarakat yang berselisih tentang kendali atas tanah berhutan dengan perusahaan-perusahaan raksasa.

Scale Up Lembaga yang fokus terhadap isu konflik sumber daya alam, sejak didirikan pada tahun 2007 *intens* melakukan pengumpulan data perihal konflik sumber daya alam yang terjadi di Propinsi Riau pada khususnya. Data sebagai sumber informasi yang Scale Up peroleh didapat dari sumber media informasi elektronik maupun surat kabar, selain itu data konflik juga didapat dari proses penyelesaian sengketa alternatif yang Scale Up lakukan pada beberapa wilayah konflik yang terjadi di Propinsi Riau.

Dari hasil pengamatan Scale Up sepanjang tahun 2012, terdapat 29 konflik agraria di Propinsi Riau, yaitu jika ditinjau dari tipologi konflik SDA berdasarkan pelaku, merupakan konflik antara masyarakat *versus* perusahaan. Jika dilihat dari luasan konflik, maka luas lahan yang disengketakan adalah 79.100 hektar yang terdiri dari sengketa di sektor kehutanan sejumlah 57.355 hektar (9 konflik) dan di sektor perkebunan sejumlah 21.745 hektar (10 konflik). Dari sekian konflik yang terjadi telah memakan korban jiwa 1 orang meninggal dunia. Selain itu, konflik tapal batas juga mengisi laporan pada periode tahun ini dengan jumlah sedikitnya 4 konflik, dan pertambahan sejumlah 6 konflik.

Sebagai perbandingan, menurut data yang dikumpulkan oleh HuMa dalam Outlook Konflik 2012, sebanyak 91.968 orang dari 315 komunitas telah menjadi korban dalam konflik sumber daya alam dan agraria. Dari 22 propinsi konflik yang didokumentasikan HuMa, tujuh di antaranya mencuatkan seringnya konflik. Rinciannya, Aceh menyimpan 10 kasus dengan total luas lahan 28.522 hektare, Banten 14 kasus yang menimpa 8.027 ha, Jawa Barat 12 kasus seluas 4.422 ha, dan Jawa Tengah 36 kasus yang melibatkan 9.043 ha.

Lainnya, Kalimantan Barat memiliki 11 kasus dengan luas 551.073 ha, Kalimantan Tengah punya 67 kasus di atas lahan 254.671 ha, Kalimantan Timur 7 kasus di 21.030 ha, dan Kalimantan Selatan menyimpan 1 kasus dengan luas 120 ha. Konflik sektor perkebunan merupakan sektor konflik terbanyak, disusul kehutanan dan pertambangan. [Sumber : [www.huma.or.id](http://www.huma.or.id)]

Inisiatif - inisiatif penyelesaian konflik sumber daya alam selain mekanisme pengadilan, masih belum banyak berkembang untuk menjawab masalah ini. Pengadilan sebagai tempat untuk menyelesaikan konflik, seringkali justru menyebabkan munculnya konflik baru setelah hakim membuat keputusan.

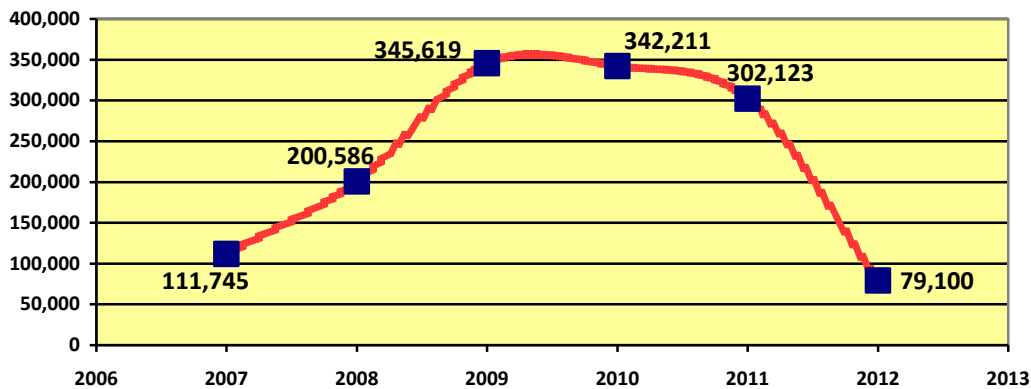
Scale Up telah berupaya keras mengembangkan inisiatif-inisiatif baru penyelesaian konflik melalui mekanisme di luar pengadilan khususnya melalui pendekatan mediasi. Pendekatan mediasi dipilih karena diyakini bisa mewujudkan penyelesaian yang lebih berkeadilan, damai serta mengembalikan atau menciptakan hubungan baru yang lebih harmoni setelah para pihak berkonflik menemukan kesepakatan. Hubungan harmoni yang tercipta diharapkan menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan.

## **2. Perbandingan konflik SDA 6 (enam) tahun terakhir**

Hasil penelitian/analisis dan monitoring konflik sumber daya alam di Riau yang dilakukan Scale Up selama enam (6) tahun terakhir menunjukkan *trend* peningkatan frekwensi dan luasan lahan yang disengketakan di setiap tahunnya, dan mengalami penurunan pada tahun 2012. Berdasarkan laporan tahunan Scale Up tahun 2007 konflik sumber daya alam di Riau seluas 111.745 hektar, kemudian tahun 2008 meningkat menjadi 200.586 hektar, Pada tahun 2009 meningkat secara drastis menjadi 345.619 hektar. Pada tahun 2010 luas lahan yang disengketakan mengalami penurunan menjadi 342.571 hektar dan pada tahun 2011 luas lahan yang disengketakan 302.123 hektar, pada tahun 2012 luas lahan yang disengketakan mengalami penurunan yakni 79.100 hektar, dibandingkan tahun 2011. Penurunan ini diperkirakan bukan karena areal lahan yang disengketakan lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun lebih dikarenakan kendala/kesulitan untuk

mengidentifikasi luasan yang disengketakan, maka dalam laporan ini tidak dicatat sebagai konflik. Berdasarkan pendekatan ini, diakui bahwa banyak konflik lahan yang terjadi selama tahun 2012, namun tidak dicatat dalam laporan penulisan ini, Karena itu, sangat mungkin orang akan menemukan bahwa luasan lahan yang disengketakan di Riau selama 2012 lebih besar dari yang dilaporkan dalam studi ini. Berikut diagramnya :

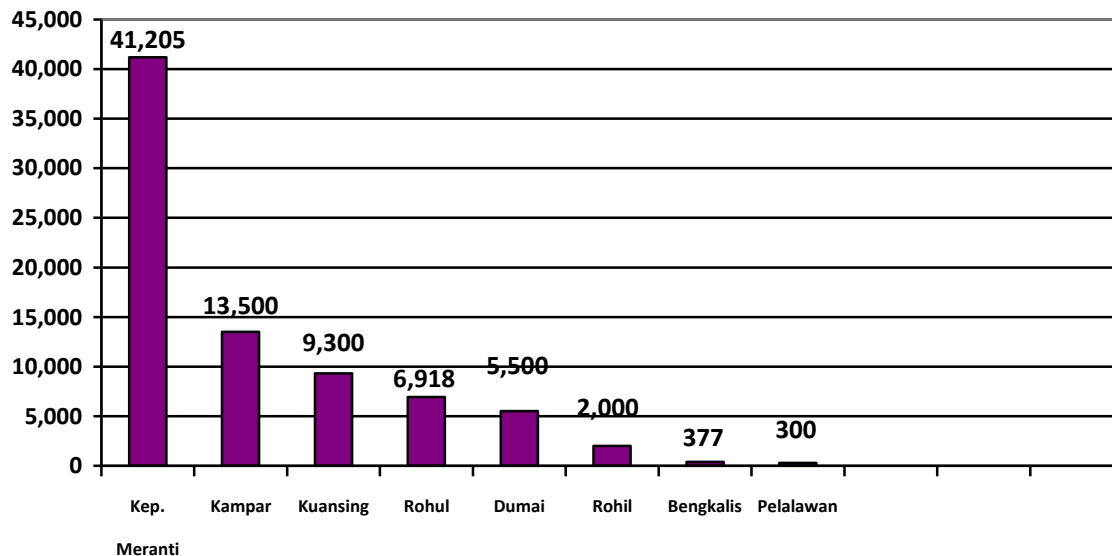
**Diagram 1 : Perbandingan Total Luasan Konflik Sumberdaya Alam di Riau tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012**



**Luas lahan konflik berdasarkan kabupaten/kota di Riau**

Studi ini menemukan konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan di Riau selama tahun 2012 terjadi di 29 titik, yang tersebar di semua kabupaten/ kota di propinsi ini, dengan melibatkan lahan seluas 79.100 hektar. Adapun distribusi titik-titik lokasi konflik apabila dilihat berdasarkan lokasi kabupaten/kota, paling banyak terjadi di Kampar (8 titik), disusul Rohul (4 titik), kemudian Dumai (3 titik), Inhu (3 titik). Lalu disusul Kuansing (2 titik), Pelalawan (2 titik), Rohil (2 titik), Inhil (2 titik). Paling sedikit ditemukan di Bengkalis (1 titik), Kepulauan Meranti (1 titik), Pekanbaru (1 titik), dan Siak (0). Meskipun titik lokasi konflik lahan di Kampar paling banyak dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, tetapi berdasarkan luas wilayah yang disengketakan, konflik dengan lahan terluas terjadi di Kepulauan Meranti (41.205 hektar), disusul Kampar (13.500 hektar), Kuansing (9.300 hektar), Rohul (6.918 hektar), Dumai (5500 hektar), Rokan hilir (2000 hektar), Bengkalis (377 hektar), dan Pelalawan (300 hektar). Berikut diagramnya :

*Diagram : Distribusi total luas lahan konflik sumber daya alam berdasarkan kabupaten/kota di Riau*

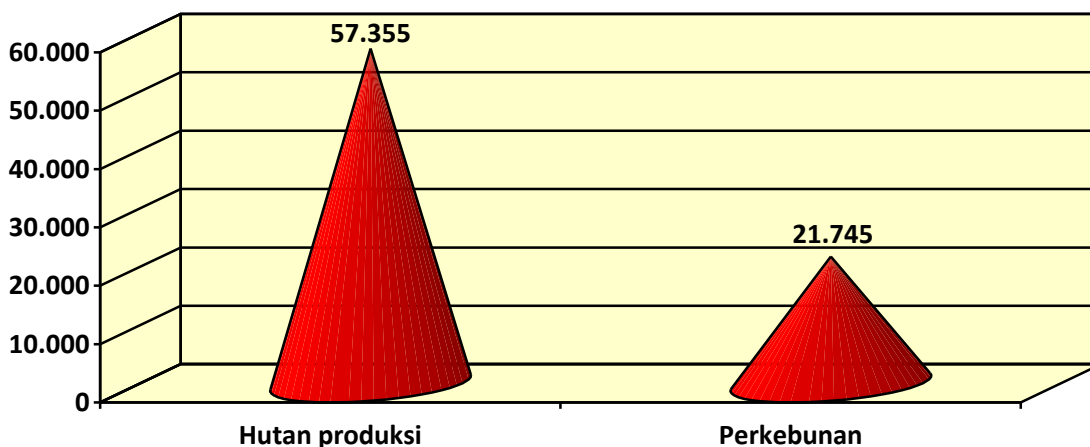


Dapat dilihat dari diagram di atas, luas wilayah lahan konflik terbanyak berada di Kepulauan Meranti dibanding dengan kabupaten/kota lain yang disebabkan kontroversi pembangunan HTI oleh PT. RAPP di pulau padang wilayah administratif kabupaten Kepulauan Meranti. Sengketa lahan terkait pembangunan HTI menjadi topik yang paling banyak diberitakan di media massa lokal, nasional maupun internasional.

### **Konflik berdasarkan sektor**

Scale Up menemukan konflik di tahun 2012 yang didominasi oleh sektor kehutanan seluas 57.355 hektar dan diikuti oleh perkebunan kelapa sawit seluas 21.745 hektar. Artinya pada tahun 2012 lebih banyak terjadi di kawasan hutan produksi, Untuk jenis perusahaan konflik terbanyak terdapat di hutan tanaman industri dan perkebunan kelapa sawit. Perhatikan diagram dibawah ini :

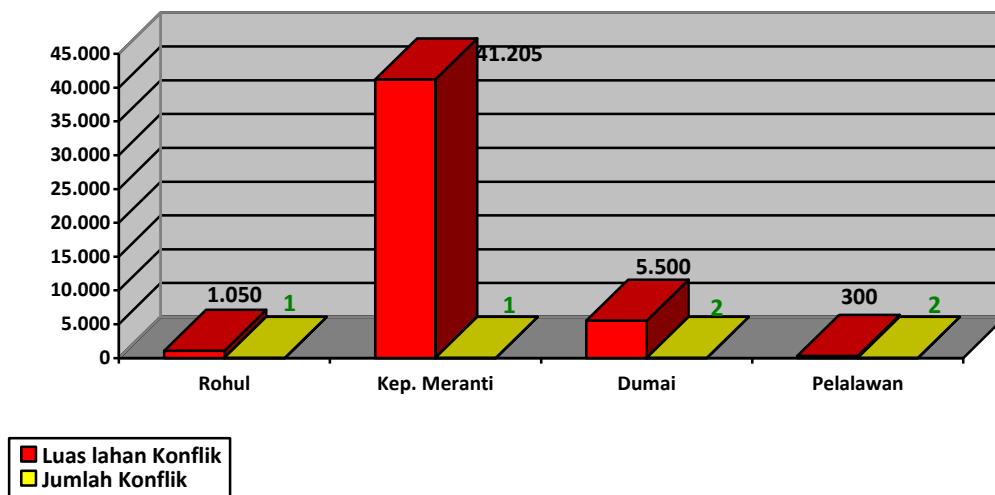
**Diagram 3 : Perbandingan jumlah konflik berdasarkan sektor**



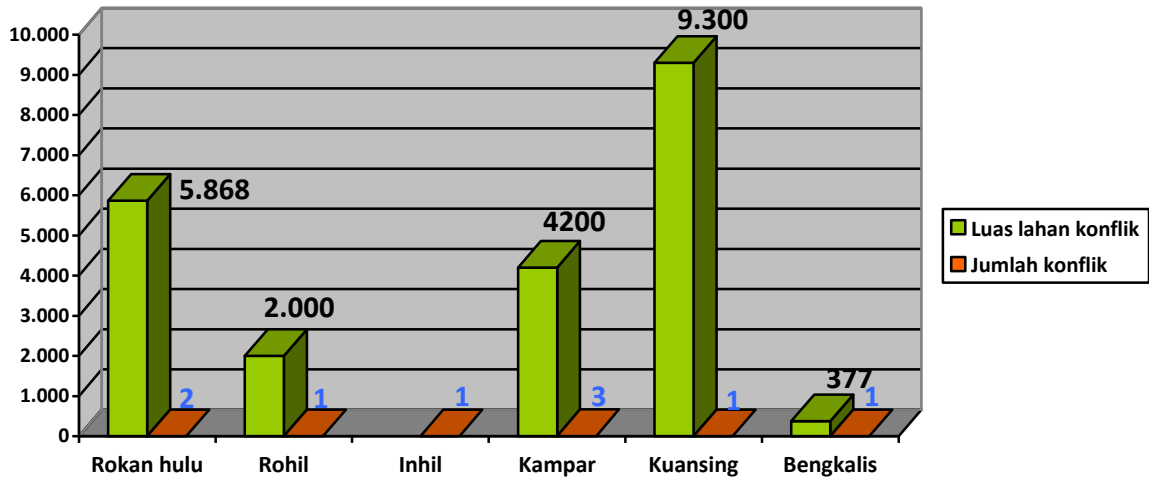
Berdasarkan sektor, titik lokasi konflik lahan dengan masyarakat selama 2012 didominasi oleh sektor kehutanan. Selama 2012 tercatat sebanyak 10 konflik terjadi di sektor kehutanan, 9 konflik di sektor perkebunan. Sektor kehutanan mendominasi konflik yang terjadi tetapi juga mendominasi luas lahan. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, sebanyak 57.355 hektar sengketa lahan terjadi di sektor kehutanan, berbanding dengan 21.745 hektar konflik lahan yang terjadi di area yang berstatus HPL/Perkebunan. Ini artinya sebagaimana kondisi tahun 2012, sektor kehutanan sebagai penyumbang konflik terluas dibandingkan dengan sektor perkebunan. Berikut diagramnya :

**Diagram 4 : Luas lahan dan jumlah konflik sumber daya alam kabupaten/kota di Riau**

Sektor kehutanan (hutan tanaman industri) :

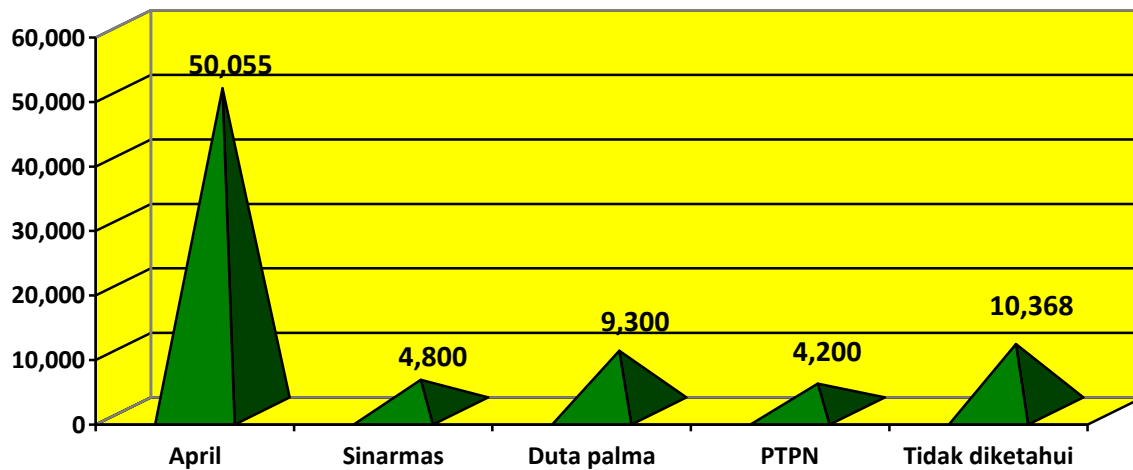


Sektor perkebunan :



Studi ini juga menganalisa konflik lahan antara masyarakat selama 2012 berdasarkan grup perusahaan yang bersengketa. Harus diakui terdapat kesulitan untuk mengidentifikasi pengelompokan grup perusahaan. Sebab, sebagian perusahaan dapat ditelusuri pengelompokannya terhadap grup tertentu, tetapi sebagian lainnya sulit diidentifikasi. Karena itu, pendekatan yang digunakan dalam mengidentifikasi grup perusahaan yang berkonflik adalah dengan membuat pengelompokan grup besar perusahaan terhadap perusahaan-perusahaan yang berdasarkan data yang ada dapat diketahui secara pasti dan meyakinkan, sementara perusahaan yang tidak dapat diketahui grup perusahaannya dikelompokkan ke dalam kategori "tidak diketahui". Berdasarkan pertimbangan ini, perusahaan/institusi yang berkonflik dengan masyarakat sedikitnya dapat diklasifikasi ke dalam lima (5) grup, yaitu APRIL Grup, Sinarmas Grup, PTPN, Duta Palma Grup dan perusahaan yang Tidak diketahui grupnya. Sangat mungkin terdapat beberapa perusahaan yang tidak mengindikasikan dengan salah satu grup tertentu, tetapi dalam studi ini dikelompokkan sebagai "Tidak Diketahui grup perusahaannya".

**Diagram 5 : Distribusi konflik berdasarkan grup perusahaan**



Studi ini menemukan sebanyak 50.055 hektar konflik lahan terjadi antara masyarakat dan perusahaan yang tergabung dalam April grup. Kenyataan bahwa area konsesi perusahaan yang tergabung dalam APRIL Grup paling banyak bersengketa dengan masyarakat bukan merupakan temuan yang mengejutkan, meskipun kondisi ini merupakan sesuatu yang amat memperhatikan. Dikatakan bukan sesuatu yang mengejutkan karena pada studi tahun-tahun sebelumnya, Scale Up mengidentifikasi bahwa konflik lahan di sektor HTI (Hutan Tanaman Industri) terjadi antara masyarakat dengan PT RAPP dan Mitranya (APRIL Grup). Untuk lebih detail, lihat tabel 1 berikut ini :

**Tabel 1. Daftar nama perusahaan dan luas (ha) konflik antara masyarakat dengan perusahaan tahun 2012**

No	Nama Perusahaan	Grup	Luas (Ha)
1	PT. Nusa Prima Manunggal (Kec. Kampar)	APRIL	300
2	PT. Sumatera Riang Lestari (Rupat, bengkalis)	APRIL	5500
3	PTPN V (Kampar)	PTPN	4200
4	PT. Andika Permata Sawit Lestari (Rohil)	Tidak diketahui	2000
5	PT. Merangkai Artha Nusantara (Rohul)	Tidak diketahui	360
6	PT. Mazuma Agro Indonesia (Rohul)	Tidak diketahui	5508
7	PT. Tribakti Sarimas (Kuansing)	Tidak diketahui	9300
8	PT. Surya dumai agrindo (Bengkalis)	Surya dumai	377
9	PT. Sumatra Sylva Lestari (Rohul)	APRIL	1050
10	PT. RAPP (Pulau Padang)	APRIL	41.205

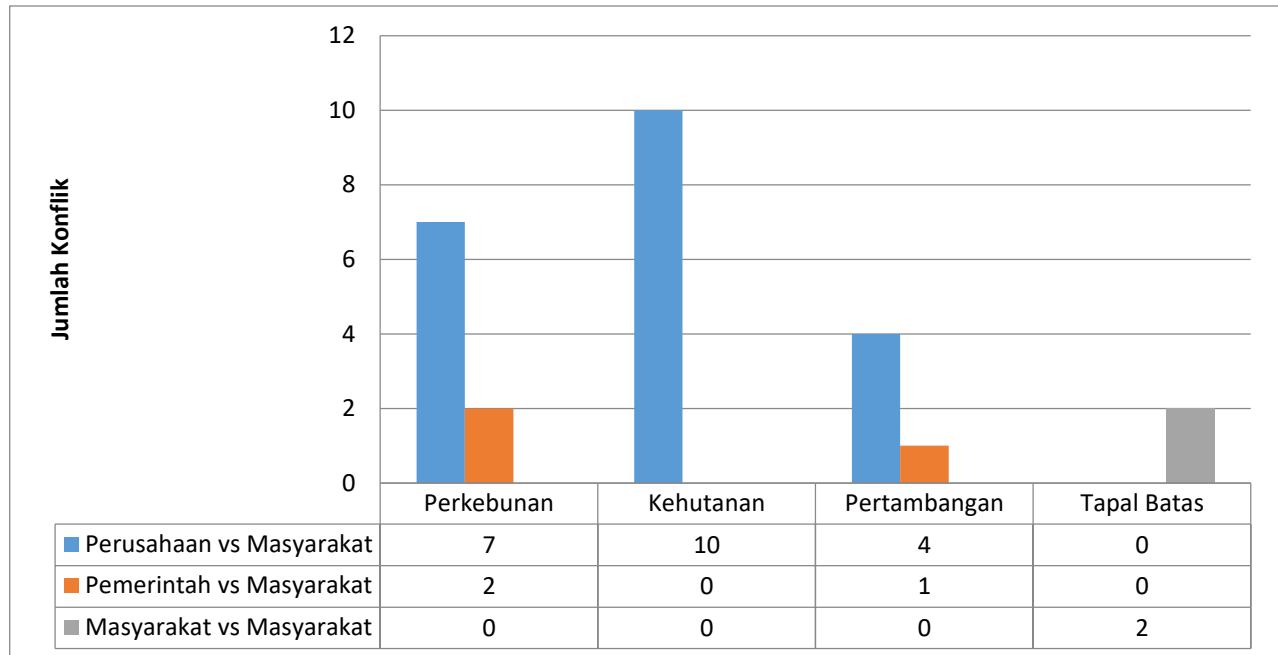
11	PT. Arara abadi (Pelalawan)	Sinarmas	300
12	PT. RAPP (Gunung sahilan)	APRIL	2000
13	PT. Perawang Sukses Perkasa Industri (Siabu)	Sinarmas	4500
14	PT. Raka	Tidak diketahui	2500
	<b><i>Total Luas Lahan Konflik</i></b>		<b><i>79.100</i></b>



## 1. Para pihak yang terlibat konflik

Berdasarkan kompilasi data konflik SDA yang dikumpulkan Scale Up sepanjang tahun 2012, perusahaan swasta adalah sebagai pelaku utama terbanyak yang berkonflik dengan masyarakat dan ada dua perusahaan lainnya berasal dari sektor perkebunan milik pemerintah (PTPN V). Berikut di bawah ini adalah Tabel Tipologi Konflik SDA di Riau Berdasarkan Pelaku pada Tahun 2012 :

*Diagram 6 : Tipologi konflik SDA berdasarkan pelaku di Riau pada tahun 2012*



## 2. Korban konflik sumberdaya alam

Korban konflik SDA di Propinsi Riau sepanjang tahun 2012, telah terjadi di sejumlah sektor (kehutanan dan perkebunan) serta tapal batas, sedikit banyak telah memakan korban luka-luka dan meninggal dunia. Aksi kecil-kecilan seperti unjuk rasa damai dan pendudukan lahan, kemudian secara perlahan meningkat menjadi aksi kekerasan seperti teror, provokasi, pengrusakan tanaman, dan penahanan aset milik perusahaan oleh warga, atau pengrusakan properti dan tanaman milik warga oleh perusahaan, hingga berujung pada bentrokan, pembakaran, dan penganiayaan yang menyebabkan jatuhnya korban luka dan meninggal dunia, telah mengisi catatan konflik SDA pada tahun ini.

Untuk mengetahui jumlah detil dan akurasi korban luka-luka memang dirasa sulit jika dibandingkan detil jumlah korban yang meninggal dunia, karena korban yang meninggal dunia selalu

masuk dalam laporan pihak kepolisian. Tetapi terjadinya benturan atau bentrok fisik di antara kedua belah pihak yang bersengketa dan menyebabkan korban luka dan meninggal dunia adalah fakta terjadi di lapangan pada beberapa wilayah konflik yang dipantau selama ini. Berikut adalah tabel jumlah korban akibat konflik SDA di Riau pada tahun 2012 :

**Tabel 3 : jumlah korban akibat konflik SDA di Riau pada tahun 2012**

<b>Korban</b>	<b>Jumlah</b>
Luka-luka	<b>37</b>
Meninggal dunia	<b>1</b>

### **3. Penyebab terjadinya konflik**

Berdasarkan catatan konflik SDA yang terekam di sepanjang tahun 2012, penyebab terjadinya konflik di Propinsi Riau adalah berasal dari konflik yang sudah lama terjadi, namun letupan konfliknya masih terdengar di tahun ini. Penyebab terjadinya konflik SDA menurut pantauan Scale Up, pada Sektor Perkebunan lebih banyak disebabkan oleh penyerobotan lahan/tanah ulayat milik masyarakat oleh perusahaan. Selain itu, saling klaim bukti kepemilikan lahan dan pengingkaran perjanjian pengelolaan lahan, juga ‘mewarnai’ sebab musabab terjadinya konflik ini. Fakta lain penyebab konflik adalah terjadinya pencemaran limbah pabrik kelapa sawit oleh perusahaan dan memicu kemarahan masyarakat. Ditinjau dari eskalasi konflik, provokasi terhadap warga hingga ke penganiayaan menjadi bagian dari pemicu meningkatnya konflik.

Jika dilihat dari Sektor Kehutanan, penyebab terjadinya konflik juga didominasi oleh aksi penyerobotan lahan/tanah ulayat dan aksi klaim lahan atas dasar izin areal konsesi yang tumpang tindih dengan lahan/tanah ulayat milik masyarakat. Selain itu, penanaman di areal konflik dan aksi pembalakan tanpa izin dari masyarakat setempat, serta janji-janji kosong perusahaan juga menjadi bagian dari pemicu. Penolakan keras atas beroperasinya perusahaan oleh masyarakat sampai terjadinya bentrok fisik yang berakibat musnahnya harta dan hilangnya korban nyawa baik dari pihak perusahaan dan masyarakat, masih mengisi catatan konflik sepanjang tahun 2012.

Pada kasus Tapal Batas, berdasarkan data yang diperoleh, ada beberapa penyebab terjadi konflik antara lain adalah bergesernya tapal batas, persoalan konflik tapal batas yang tidak jelas dan berlarut-larut, serta saling klaim wilayah (perkebunan) karena persoalan tapal batas yang belum duduk titik pasti batas-batas wilayah oleh pihak berwenang. Tipologi konflik pada kasus Tapal Batas

didominasi konflik antara masyarakat *versus* masyarakat. Berikut adalah tabel penyebab terjadinya konflik di Riau pada tahun 2012 :

**Tabel 4 : Penyebab terjadinya konflik di Riau pada tahun 2012**

No	Sektor Kehutanan	Sektor Perkebunan	Tapal Batas
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kasus pembalakan liar oleh perusahaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kasus penyerobotan tanah ulayat (2 kasus)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kasus bergesernya tapal batas</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kasus tuntutan warga atau petani atas lahan yang masuk dalam konsesi perusahaan (3 kasus)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kasus Penyerobotan lahan masyarakat atau petani (4 kasus)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kasus/ persoalan konflik tapal batas yang tidak jelas dan berlarut-larut</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kasus janji penyerahan areal tanaman kehidupan ke warga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kasus limbah pabrik kelapa sawit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kasus saling klaim wilayah (perkebunan) karena persoalan tapal batas yang belum duduk</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kasus penyerobotan lahan masyarakat (2 kasus)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kasus Penguasaan lahan atas dasar SK Bupati</li> </ul>	
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kasus penguasaan tanah ulayat atau saling klaim kepemilikan lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kasus saling klaim kepemilikan lahan</li> </ul>	
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kasus penolakan warga terhadap izin HTI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kasus janji penyerahan lahan ke warga</li> </ul>	

#### 4. Upaya penyelesaian

##### a) Upaya Penyelesaian Konflik Sektor Perkebunan

Konflik perkebunan di Propinsi Riau merupakan konflik yang sering terjadi dan tidak pernah reda, demikian pula yang terjadi di sepanjang tahun 2012 ini. Dari hasil tinjauan tim Scale Up, sumber konflik paling besar *disumbangkan* sektor perkebunan adalah dari jenis perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Kebanyakan konflik perkebunan di wilayah Propinsi Riau merupakan bagian dari konflik yang sudah lama terjadi. Jika ditinjau dari rekaman konflik sepanjang tahun 2012, konflik – konflik pada tahun tersebut berasal letupan-letupan dari konflik sebelumnya.

Melihat problematika dan potret buram dari bisnis sektor perkebunan kelapa sawit hingga selalu melahirkan persoalan-persoalan konflik SDA yang sepertinya tiada kunjung usai, pihak pemerintah lewat Direktor Jendral Perkebunan melalui surat 5 Januari 2012 dan 27 Desember 2011, meminta kepada seluruh kepala daerah untuk dapat menyelesaikan konflik di perkebunan kelapa sawit guna pencegahan dini terjadinya konflik dan kewajiban penerima IUP membangun kebun masyarakat.

### ***Studi kasus konflik masyarakat Desa Sinama Nenek versus PTPN V***

Menariknya, di wilayah Propinsi Riau, diketahui ada dua konflik perkebunan kelapa sawit yang melibatkan perusahaan milik pemerintah atau BUMN yang berkonflik dengan masyarakat. Salah satunya adalah konflik masyarakat Desa Sinama Nenek *versus* PTPN V yang berada di Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Isu konflik ini pun telah masuk pada skala nasional.

Kasus masyarakat Desa Sinama Nenek *versus* PTPN V, berawal dari penyerobotan lahan milik warga (anak kemenakan pewaris tanah ulayat) oleh perusahaan, sehingga memicu kemarahan dan selanjutnya mereka mengadukan persoalan ini ke DPRD Kampar, dan dewan telah berupaya mengarahkan warga untuk berunding dengan PTPN V.

Persoalan ini tidak hanya sampai di tingkat lokal, bahkan sudah sampai ke Komnas HAM. Pihak Komnas HAM dan Komisi I pun telah bersepakat menemui presiden terkait konflik Desa Sinama Nenek. Komnas HAM pun telah mengeluarkan rekomendasi agar presiden melalui Kementerian BUMN agar menyerahkan lahan tersebut kepada masyarakat. Namun rekomendasi tersebut hingga kini belum juga dilaksanakan.

Pada akhir tahun 2012, titik konflik ini dikunjungi oleh Panitia Akuntabilitas Publik (PAP), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dan warga berharap kedatangan panitia ini dapat mendorong agar rekomendasi Komnas HAM tersebut segera dilaksanakan.

Berdasarkan catatan Scale Up, dari pengaduan-pengaduan baik tertulis maupun tidak dan dari fakta-fakta konflik yang terjadi di lapangan - terkait konflik sektor perkebunan – pun telah sampai ke pemerintah daerah maupun pemerintah pusat hingga ke jalur pengadilan. Berbagai strategi dan upaya-upaya penyelesaian baik oleh masyarakat (melalui aspirasi, laporan tertulis, demonstrasi, ancaman, pendudukan lahan, dan bahkan bentrokan) maupun oleh departemen dan dinas terkait (misalnya Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan lembaga lainnya) sudah diusahakan dan dijalankan, berbagai tim dibentuk bahkan diselenggarakan dialog-dialog dan seminar. Meskipun ada sedikit persoalan yang boleh dikatakan selesai, tetapi secara menyeluruh tidak menyentuh akar persoalan. Berikut adalah tabel yang memperlihatkan upaya-upaya penyelesaian konflik perkebunan di Riau pada tahun 2012 :

**Tabel 5 : Bentuk upaya penyelesaian konflik perkebunan di Riau pada tahun 2012**

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN</b>	<b>VERSUS</b>	<b>UPAYA PENYELESAIAN</b>
1	<b>Kampar</b> (Warga Desa Sinama Nenek)	PTPN V (Kasus penyerobotan tanah ulayat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warga mengadu ke DPRD Kampar</li> <li>• DPRD Kampar sudah mengarahkan warga berunding dengan PTPN V</li> <li>• Kasus sampai ke Komnas HAM, lalu Komnas HAM dan Komisi I sepakat temui Presiden terkait konflik ini</li> <li>• Titik konflik dikunjungi oleh Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI</li> </ul>
2	<b>Kampar</b> (Warga Sungai Ogung)	PTPN V (Kasus limbah pabrik kelapa sawit)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warga mengadu ke pemerintah</li> <li>• Kasus sampai ke KemenLH</li> <li>• KemenLH menyerahkan permasalahan pembuangan limbah ke Sungai Tapung di Tapung hulu kepada BLH Riau</li> </ul>
3	<b>Kampar</b> (Warga Desa Danau Lancang)	PT. RAKA (Kasus Penyerobotan tanah ulayat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warga mengadu ke Pemkab Kampar</li> <li>• Pemkab Kampar melalui Dishut Kampar sudah menyatakan aktivitas PT. RAKA ilegal</li> <li>• PT. RAKA tetap melakukan aktivitas sehingga memicu kemarahan warga hingga terjadi pengrusakan dan pembakaran properti milik perusahaan</li> </ul>
4	<b>Kampar</b> (Warga Desa Koto Garo)	PT. RAKA (Kasus Penyerobotan lahan masyarakat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warga melakukan aksi demonstrasi ke kantor bupati</li> <li>• Warga mengadu ke DPRD Kampar</li> <li>• DPRD Kampar meminta Bupati menutup izin perusahaan</li> <li>• Dishut Kampar menyatakan pembukaan perkebunan PT. RAKA dinyatakan ilegal</li> </ul>
5	<b>Rokan Hulu</b> (Warga Batang Kumu)	PT. MAI (Kasus Penyerobotan lahan masyarakat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat desa membentuk posko pengamanan terpadu</li> <li>• Posko akan diisi oleh personil kepolisian Aparat TNI, tokoh masyarakat Batang Kumu serta tokoh pemuda</li> <li>• Camat Tambusai menghimbau kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk menahan diri dan tidak terprovokasi hingga adanya kejelasan dari pihak berwenang tentang status lahan</li> </ul>
6	<b>Rokan Hulu</b> (Warga Desa Pagar Mayang)	PT. MAN (Kasus Penguasaan lahan atas dasar SK Bupati)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warga mengadu ke DPRD Rokan Hulu</li> <li>• Anggota Komisi III DPRD Rokan Hulu berjanji akan berkordinasi dengan Pemerintah dan</li> </ul>

			meninjau ulang SK Bupati
7	<b>Rokan Hilir</b> (Dusun I dan II Kepenghuluan Putat)	PT. APSL (Kasus <i>Penyerobotan lahan masyarakat</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengadu Ke DPRD Rokan Hilir karena perusahaan melakukan pengrusakan dan penganiayaan terhadap warga</li> <li>• Warga sempat melakukan <i>hearing</i> dengan anggota DPRD</li> </ul>
8	<b>Indragiri Hilir</b> (Warga Desa Pancur)	PT. PALMA I (Kasus <i>Penyerobotan lahan milik petani</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warga mengadu ke Pemkab karena perusahaan melakukan provokasi dan pengrusakan tanaman sawit milik petani</li> <li>• Pemkab mengirimkan undangan <i>hearing</i> ke perusahaan tetapi tidak diindahkan</li> </ul>
9	<b>Bengkalis</b> (Warga Desa Dompas)	PT. SDA (Kasus <i>saling klaim kepemilikan lahan</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasus dibawa ke pengadilan, proses masih berjalan, dan belum ada keputusan final</li> </ul>
10	<b>Kuantan Singingi</b> (Warga Kecamatan Kuantan Mudik)	PT. Tribakti Sarimas (Kasus <i>janji penyerahan lahan ke warga</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warga mengadu ke DPRD Riau, karena janji untuk menyerahkan lahan yang dulunya tanah ulayat, tidak ditepati oleh perusahaan</li> </ul>

#### b) Upaya Penyelesaian Konflik Sektor Kehutanan

Mencuatnya kasus persoalan konflik sektor kehutanan di Propinsi Riau bukan berita baru. Berdasarkan pantauan tim Scale Up sepanjang tahun 2012, sumber konflik paling banyak *disumbangkan* sektor kehutanan adalah dari jenis perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Grup APRIL dan Sinar Mas sebagai dua perusahaan HTI terbesar di Riau, sejak lama telah banyak memberikan kontribusi kerusakan hutan alam (deforestasi) di Propinsi Riau, kini salah satunya penghancuran lahan gambut, sehingga memberikan efek langsung terhadap persoalan besar seperti konflik sosial yang berlangsung lama dan terus menerus dan juga diyakini telah meningkatkan emisi gas rumah kaca (*Green House-Gas*).

#### ***Studi kasus konflik masyarakat Buluhala, Kota Dumai versus PT. Suntura Gajapati (SGP)***

Dari sembilan (9) konflik yang terjadi di sektor kehutanan sepanjang tahun 2012, terdapat satu kasus konflik agraria yang menelan korban jiwa. Jika menyorot kasus konflik masyarakat Buluhala, Kota Dumai *versus* PT. Suntura Gajapati (SGP), konflik berawal dari pertikaian

kepemilikan lahan antara warga dengan perusahaan. Diketahui bahwa rekomendasi calon lokasi HPH Tanaman PT.Suntara Gajapati di Propinsi Riau dengan dasar penerbitan Keputusan Menhut RI adalah berlokasi di Kecamatan Bangko. Tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan, ternyata aktivitas perusahaan berjalan di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai yang tidak pernah menjadi bagian dari Kecamatan Bangko.

Persoalan konflik akhirnya memuncak sehingga terjadi benturan antara warga dan pihak/*security* perusahaan yang berujung pada bentrok berdarah dan menelan satu korban jiwa meninggal (Supratmin, 30).

Kasus ini selanjutnya diadukan ke pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga mendorong terbentuknya panitia khusus (Pansus) HTI DPRD Dumai guna menuntaskan sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan ini. Tidak hanya upaya itu, bahkan masyarakat di Kecamatan Sungai Sembilan, berhasil membawa tim Komnas HAM RI untuk meninjau langsung titik konflik sengketa lahan.

Berikut adalah tabel yang memperlihatkan upaya-upaya penyelesaian konflik kehutanan di Riau pada tahun 2012 :

**Tabel 6 : Bentuk upaya penyelesaian konflik kehutanan di Riau pada tahun 2012**

NO	KABUPATEN	VERSUS	GRUP	UPAYA PENYELESAIAN
1	<b>Kampar</b> (Warga Persekutuan Mandailing Kenegerian Bangkinang)	PT. Nusa Prima Manunggal / NPM (Kasus pembalakan liar oleh perusahaan)	APRIL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Warga mengadu ke DPRD Kampar</li> <li>DPRD Kampar membentuk tim khusus</li> </ul>
2	<b>Kampar</b> (Warga Desa Dusun Kaumang)	PT. RAPP (Kasus tuntutan warga atas lahan yang masuk dalam konsesi perusahaan)	APRIL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Warga melakukan perundingan dengan perusahaan beserta aparat desa</li> <li>Warga mengadu ke pemerintah kabupaten</li> <li>Kapolsek memfasilitasi pertemuan mediasi</li> </ul>
3	<b>Kampar</b> (Warga Kenegerian Koto Sebelimbing)	PT. PSPI (Kasus penguasaan tanah ulayat dan saling klaim kepemilikan lahan)	SINAR MAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Warga melakukan perundingan dengan perusahaan</li> <li>Kapolres bersedia memfasilitasi pertemuan mediasi</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Kehutanan Kampar memfasilitasi pertemuan para datuk (ninik mamak)</li> </ul>
4	<b>Pelalawan</b> (Warga Desa Kesuma)	PT. Arara Abadi (Kasus lahan masyarakat masuk dalam konsesi perusahaan)	SINAR MAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Warga mengadu ke pemerintah kabupaten</li> <li>Kapolres mencoba memfasilitasi pertemuan mediasi</li> </ul>
5	<b>Pelalawan</b> (Warga Desa Terbangiang)	PT. Arara Abadi (Kasus janji penyerahan areal tanaman kehidupan ke warga)	SINAR MAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengadu ke DPRD untuk memfasilitasi pertemuan/mediasi</li> <li>Warga mengeluarkan ancaman akan menutup jalan operasional perusahaan</li> </ul>
6	<b>Dumai</b> (Warga Buluhala)	PT.Suntara Gajapati (SGP) (Kasus Penyerobotan lahan masyarakat)	SINAR MAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Warga mengadu ke pemerintah daerah dan pemerintah pusat</li> <li>Mendatangkan Komnas HAM RI ke lokasi konflik</li> </ul>
7	<b>Bengkalis</b> (Warga Desa Pergam dan Desa Mesim)	PT. SRL / Sumatera Riang Lestari (Kasus lahan masyarakat & petani masuk dalam konsesi perusahaan)	APRIL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat dan petani mengadu ke STR</li> <li>Komite Pimpinan Kecamatan STR meminta bupati memfasilitasi dan memediasi pertemuan pihak bersengketa</li> <li>DPRD Bengkalis pun telah membentuk Pansus HTI SRL Pulau Rupa</li> </ul>
8	<b>Rokan Hulu</b> (Warga Desa Tangun)	PT Sumatera Silva Lestari /SSL (Kasus Penyerobotan lahan masyarakat)	APRIL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Warga mengadu ke pemerintah kabupaten</li> <li>Pemerintah kabupaten sudah turun ke lokasi konflik</li> <li>Masyarakat menggelar doa bersama</li> </ul>
9	<b>Kepulauan Meranti</b> (Warga Pulau Padang)	PT. RAPP (Kasus penolakan warga terhadap izin HTI)	APRIL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Warga mengadu ke pemerintah daerah dan pemerintah pusat</li> <li>Warga melakukan aksi demonstrasi dan aksi jahit mulut</li> </ul>



				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemenhut membentuk tim mediasi, tim pemetaan partisipatif, tim verifikasi independen, dan multipihak untuk meninjau kembali perizinan/perubahan izin</li> </ul>
--	--	--	--	--

c) Upaya Penyelesaian Konflik Tapal Batas

Persoalan tapal batas masih menjadi isu yang berkembang di Propinsi Riau. Sepanjang tahun 2012, ditemukan tiga konflik tapal batas yang melibatkan lima wilayah. Konflik tersebut adalah antara wilayah Kabupaten Rokan Hilir *versus* Propinsi Sumatera Utara, Kota Dumai *versus* Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Indragiri Hulu *versus* Kabupaten Kuantan Singingi.

Persoalan tapal batas yang berkembang menjadi konflik antar wilayah ini, sebetulnya sudah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu, meskipun belum menimbulkan korban jiwa meninggal, tapi dikhawatirkan *trend* dan jumlahnya secara perlahan meningkat. Konflik antara wilayah Kabupaten Rokan Hilir *versus* Propinsi Sumatera Utara sudah dimulai sejak tahun 2008, dan konflik Kota Dumai *versus* Kabupaten Rokan Hilir sudah dimulai sejak tahun 2009, sementara konflik Kabupaten Indragiri hulu *versus* Kabupaten Kuantan Singingi sudah dimulai sejak tahun 2010.

Jika konflik yang terjadi sudah lama dan hingga saat ini (tahun 2012) masih belum selesai, berarti ada permasalahan yang perlu mendapat sorotan serius dan harus diselesaikan segera oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Jika tidak segera diselesaikan, maka akan menjadi pemicu konflik di segala lapisan. Penyelesaian konflik tapal batas menjadi sangat penting karena terkait erat dengan program pembangunan daerah ke depan. Jika penentuan titik tapal batas pada suatu teritorial kawasan menjadi tidak jelas, maka dapat dipastikan pembangunan suatu daerah atau wilayah itu – terutama daerah yang berada di sekitar wilayah perbatasan – akan menjadi terhenti.

Penentuan titik pasti tapal batas di suatu wilayah adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku saat ini, dengan memperhatikan kondisi adat istiadat yang berlaku di daerah perbatasan dan kondisi fisik di lapangan. Sketsa peta yang menunjukkan batas-batas wilayah dapat menjadi acuan utama, dengan syarat peta tata ruang memperlihatkan ketelitian dan sketsa yang benar agar tidak menjadi permasalahan dan penafsiran yang berbeda di kemudian hari. Berikut adalah tabel yang memperlihatkan upaya-upaya penyelesaian konflik tapal batas di Riau pada tahun 2012 :

**Tabel 7 : Bentuk upaya penyelesaian konflik tapal batas di Riau pada tahun 2012**

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN</b>	<b>VERSUS</b>	<b>UPAYA PENYELESAIAN</b>
1	<b>Rokan Hilir</b> (Warga Warga Kecamatan Pasir Limau Kapas)	<b>Propinsi Sumatera Utara</b> <i>(Warga/aparat Labuhan Batu Selatan)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warga (Rohil) mengadu ke pemerintah daerah dan pusat</li> <li>• Mendagri mendorong penyelesaian konflik tapal batas</li> </ul>
2	<b>Dumai</b> (Warga Dusun Sinepis, Teluk Dalam, dan Mekarsari)	<b>Kabupaten Rokan Hilir</b> <i>(Warga/oknum dari Kecamatan Sinaboi)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warga (Dumai) mengadu ke pemerintah daerah dan pusat</li> <li>• Warga bertekad menemui Kemendagri dan Kepolisian RI</li> </ul>
3	<b>Indragiri Hulu</b> (Warga Desa Selunak)	<b>Kabupaten Kuantan Singingi</b> <i>(Warga Desa Pulau Jambu)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warga mengadu ke pemerintah kabupaten</li> <li>• Kapolres menginstruksikan Kapolsek Peranap dan meminta Camat Batang Pinarap untuk turun tangan</li> <li>• Kapolres meminta Upika melakukan mediasi</li> <li>• Proses mediasi sudah pernah dilakukan</li> </ul>